



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 47 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana

Q

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 1312);

13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau dengan sebutan lain Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, yang secara substantif RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kerja



Walikota terpilih setelah diselaraskan dengan arah kebijakan dan pokok-pokok program Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi (RPJMP).

9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA – SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja-PD Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Renja-PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA – SKPD.

Pasal 3

- (1) Renja – PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja – PD Tahun Lalu.
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
 - BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Renja – PD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.



Pasal 4

Renja-PD Tahun 2024 terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
2. Sekretariat DPRD Kota Blitar Tahun 2024;
3. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
4. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024;
5. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
6. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024;
8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024;
9. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024;
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2024;
12. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024;
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024;
14. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024;
15. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024;
16. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2024;
17. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024;
18. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024;
20. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024;
21. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024;
22. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024;
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
24. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024;
26. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024;
27. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
28. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024;
29. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024;
30. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024.

Pasal 5

Dalam hal program dan kegiatan Renja – PD Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah program dan kegiatan hasil pembahasan bersama dengan DPRD.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 10 Agustus 2023
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

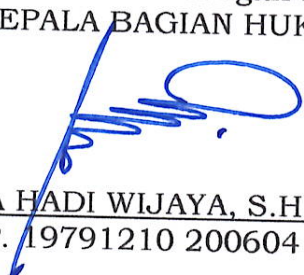
Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 10 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2023 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

10. RENCANA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat (5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sebagai dokumen perencanaan perangkat daerah, maka Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Dinas P3AP2KB Kota Blitar disusun dengan prinsip – prinsip sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD;
2. Rumusan program / kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib / pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing – masing Perangkat Daerah;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun $n + 1$;
4. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
5. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah mengutamakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.

Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang – undangan, penyusunan renja salah satunya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu pasal 78 ayat 1 huruf (d) Permendagri nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa penyusunan rancangan awal RKPD mencakup penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah. Ini artinya antara Renja dan RKPD merupakan satu entitas yang saling melengkapi dimana penyusunan Renja berpedoman pada RKPD, sementara penyusunan Ranwal RKPD mencakup penelaahan terhadap Ranwal Renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 berpedoman kepada RKPD Kota Blitar tahun 2024.

Selain berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dokumen Renja perangkat Daerah juga berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah). Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun yang berhubungan dengan tugas pokok fungsi perangkat daerah serta disusun dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis. Dalam Permendagri nomor 87 Tahun 2017, disebutkan bahwa sasaran Renstra Perangkat Daerah dan sasaran Renja Perangkat Daerah, merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang berarti harus ada kesesuaian antara dokumen renstra dengan dokumen renja Perangkat Daerah. Oleh karena itu penyusunan renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2023 juga berpedoman pada Rencana Strategis Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2021 – 2026.

Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2023. Sedangkan RKA Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2023 merupakan salah satu dasar yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang kemudian disahkan sebagai dokumen APBD Kota Blitar. Oleh karena itu Renja merupakan salah satu dokumen penting untuk kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Kota Blitar Tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Kinerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 berdasarkan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikiasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

- Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
 23. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
 24. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 26. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026;
 27. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026; dan
 28. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 40 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah daerah Kota Blitar Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 40).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahun 2024 yang menjadi penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat daerah Tahun 2021 – 2026 serta disusun mengacu pada RKPD Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program kegiatan Dinas P3AP2KB tahun 2022 ;
- Menyajikan isu strategis, tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagai fokus pelayanan yang akan diwujudkan dan dikedepankan ;
- Merumuskan program dan kegiatan yang terarah dan tepat sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah;
- Menyediakan pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)
- Menyusun perencanaan yang mengacu pada kebijakan Nasional maupun provinsi agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat nasional maupun provinsi
- Digunakan sebagai pedoman penyusunan KUAPPAS tahun 2024 dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Blitar Tahun 2024

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU	
	2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
	2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
	2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
	3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
	3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
	3.3. Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V	PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS P3AP2KB TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas P3AP2KB Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas P3AP2KB

Untuk memastikan kesinambungan dan kesesuaian antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian Renstra. Tujuan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra perangkat daerah serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pada bab ini disajikan review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas P3AP2KB Kota Blitar tahun lalu (2022) dengan mengacu pada APBD tahun 2024. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah.

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinas P3AP2KB Kota Blitar terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang tidak sesuai target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2023.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan 2 urusan yaitu urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, melaksanakan 8 program dengan 25 kegiatan dan 65 sub kegiatan.

Tabel 2.1.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2023

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023			
			Target	Satuan	Anggaran		Targ et Renj a PD Tahu n 2022	Realis asi Renja PD Tahu n 2022	Tingkat Realisas i			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84,5	Indeks	17,414,919,189		82	83,01	101,34	83	3,995,517,538	83	3,995,517,538	98%	23%
2.08.01.201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100	Persentase	194,896,212		100%	100%	100%	100%	39,546,095	100%	39,546,095	100%	20%
2.08.01.201.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	28	Dokumen	42,482,673		-	-	100%	7	8,620,095	7	8,620,095	25%	20%
2.08.01.201.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	52	Laporan	152,413,539		-	-	100%	13	30,926,000	13	30,926,000	25%	20%
2.08.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	Persen	13,974,279,724		100%	100%	100%	100%	3,242,215,447	100%	3,242,215,447	100%	23%
2.08.01.202.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	24	orang	13,958,740,874		-	-	-	24	3,238,593,047	24	3,238,593,047	100%	23%
2.08.01.202.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8	Laporan	15,538,850		-	-	-	2	3,622,400	2	3,622,400	25%	23%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023			
			Target	Satuan	Anggaran		Targ et Renj a PD Tah un 2022	Realis asi Renja PD Tahu n 2022	Tingkat Realisas i			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2.08.01.2.05	Administrasi Pengadaan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	Persen	370,019,832		100 %	100%	100%	100 %	76,265,230	100 %	76,265,230	100 %	21%
2.08.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	297	Paket	165,899,454		-	-	-	99	34,685,230	99	34,685,230	33%	21%
2.08.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33	Orang	204,120,378		-	-	-	33	41,580,000	33	41,580,000	100 %	20%
2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum PD sesuai standart	100	Persenta se	802,553,114		100 %	100%	100%	100 %	178,985,361	100 %	178,985,361	100 %	22%
2.08.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	4	paket	37,055,956		-	-	-	1	8,588,881	1	8,588,881	25%	23%
2.08.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20	Paket	74,969,527		-	-	-	5	16,780,153	5	16,780,153	25%	22%
2.08.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	16	Paket	64,394,727		-	-	-	4	13,551,207	4	13,551,207	25%	21%
2.08.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	24	Paket	41,029,581		-	-	-	6	9,183,500	6	9,183,500	25%	22%
2.08.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	4	Paket	76,056,680		-	-	-	1	17,533,670	1	17,533,670	25%	23%
2.08.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	96	Dokume n	25,828,200		-	-	-	24	5,400,000	24	5,400,000	25%	21%
2.08.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	240	laporan	469,047,849		-	-	-	60	104,985,250	163	104,985,250	68%	22%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023				
			Target	Satuan	Anggaran		Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2.08.01.2.06.10	Pematausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	4	dokumen	14,170,594		-	-	-	1	2,962,700	1	2,962,700	25%	21%
2.08.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan sesuai standar	100	%	48,112,950		100%	100%	100%	100%	7,824,000	100%	7,824,000	100%	16%
2.08.01.2.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	4	unit	48,112,950		-	-	-	1	7,824,000	1	7,824,000	25%	16%
2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100	%	1,156,988,724		100	100	100%	100	257,019,845	100	257,019,845		22%
2.08.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	4	Laporan	5,359,869		-	-	-	1	1,199,680	1	1,199,680	25%	22%
2.08.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	144	Laporan	254,951,430		-	-	-	36	55,120,165	36	55,120,165	25%	22%
2.08.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	8	Laporan	896,677,425		-	-	-	2	200,700,000	2	200,700,000	25%	22%
2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	100	Persen	868,068,633		100%	100%	100%	100	193,661,560	100	193,661,560	100%	22%
2.08.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	104	Kendaraan	475,587,340		-	-	-	41	106,448,960	41	106,448,960	39%	22%
2.08.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168	Unit	117,066,666		-	-	-	42	26,202,600	42	26,202,600	25%	22%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023			
			Target	Satuan	Anggaran		Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2.08.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	268,109,627		-	-	-	1	60,010,000	1	60,010,000	25%	22%
2.08.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	Unit	7,305,000		-	-	-	3	1,000,000	3	1,000,000	25%	14%
02.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100	Persen	4,173,798,301		100%	100%	100%	100	969,128,540	100	969,128,540	100%	23%
		Persentase peningkatan komposisi perempuan di sektor bisnis	48	Persen			45%	32.86%	73.02%	46		46		96%	
		Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	0,3	Persen			0,30%	0.21%	63.64%	0,33		0,33		110%	
2.08.02.201	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Anggaran Responsif Gender	47	Persen	391,555,899		46%	100%	100%	32	87,640,770	32	87,640,770	68%	22%
2.08.02.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Pelaksanaan PUG	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan Pengarusutamaan gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	13	dokumen	391,555,899		-	-	-	3	87,640,770	13	87,640,770	100%	22%
2.08.02.202	Pemberdayaan Perempuan bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perempuan yang mendapat fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	20,73	Persen	3,782,332,402		0,6	13.89	100%	20,53	881,487,770	20,53	881,487,770	99%	23%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023			
			Target	Satuan	Anggaran		Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2.08.02.202.01	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah dokumen hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	30	dokumen	820,276,168		-	-	-	7	183,599,246	7	183,599,246	23%	22%
2.08.02.202.02	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi masyarakat yang mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi kewenangan Kabupaten/Kota	1	organisasi	450,508,038		-	-	-	1	75,469,800	1	75,469,800	100%	17%
2.08.02.203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	12	Organisasi	1,291,589,770		12	12	100%	3	325,107,998	3	325,107,998	25%	25%
2.08.02.203.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat advokasi dan pendampingan	84	lembaga	316,586,728		-	-	-	21	73,450,166	21	73,450,166	25%	23%
2.08.02.203.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapat peningkatan kapasitas	2468	Orang	903,371,698		-	-	-	614	223,860,560	614	223,860,560	25%	25%
02.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100	Persen	1,350,061,813		100%	100%	100%	100	326,176,198	100	326,176,198	100%	24%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023				
			Target	Satuan	Anggaran		Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2.08.03.201	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang disediakan	100	Persen	99,873,632		100 %	100%	100%	100	33,794,029	100	33,794,029	100 %	34%
2.08.03.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program, dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	dokumen	99,873,632		-	-	-	2	33,794,029	2	33,794,029	20	34%
2.08.03.202	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100	Persen	835,679,391		100	100	100	100	199,604,195	100	199,604,195	100 %	24%
2.08.03.202.01	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah perempuan korban kekerasan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan layanan pengaduan	4	orang	186,412,246		-	-	-	1	43,249,340	1	43,249,340	25%	23%
2.08.03.202.02	Koordinasi dan sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi perempuan korban kekerasan kewenangan Kabupaten/Kota	8	layanan	649,267,145		-	-	-	2	156,354,855	2	156,354,855	25%	24%
2.08.03.203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Prosentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100	Persen	414,508,791		100 %	100%	100%	100	92,777,974	100	92,777,974	100 %	22%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023			
			Target	Satuan	Anggaran		Targ et Renja a PD Tahun 2022	Realis asi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisas i			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2.08.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	460	Orang	209,176,915		-	-	-	110	46,819,298	110	46,819,298	24%	22%
2.08.03.203.04	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	10	dokumen	205,331,876		-	-	-	2	45,958,676	2	45,958,676	20%	22%
02.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Persentase peningkatan pelebagaan pemenuhan hak anak	100	Persen	393,644,056		100 %	100%	100%	100	93,954,905	100	93,954,905	100 %	24%
2.08.06.201	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase anak yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	100	Persen	138,829,220		100 %	100%	100%	100	32,039,770	100	32,039,770	100 %	23%
2.08.06.201.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	10	Dokumen	138,829,220		-	-	-	2	32,039,770	2	32,039,770	20%	23%
2.08.06.202	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	100	Persen	254,814,836		100 %	100%	100%	100	61,915,135	100	61,915,135	100 %	24%
2.08.06.202.01	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah anak yang mendapatkan layanan peningkatan kualitas	410	anak/orang	117,349,029		-	-	-	100	31,146,670	100	31,146,670	24%	27%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023				
			Target	Satuan	Anggaran		Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
		hidup anak kewenangan Kabupaten/Kota													
2.08.06.202 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	6	dokumen	137,465,807		-	-	-	2	30,768,465	2	30,768,465	33%	22%
02.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100	Persen	1,318,633,134		100	100	100%	100	319,503,465	100	319,503,465	100%	24%
2.08.07.201	Pencegahan Kekerasan Anak Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	100	Persen	699,966,888		100	100	100%	100	156,671,007	100	156,671,007	100%	22%
2.08.07.201 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	22	dokumen	699,966,888		-	-	-	5	156,671,007	5	156,671,007	23%	22%
2.08.07.202	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	100	Persen	213,062,915		100	100	100%	100	72,047,760	100	72,047,760	100%	34%
2.08.07.202 .02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah layanan tindak lanjut pengaduan yang memerlukan koordinasi dan sinkronisasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan Kabupaten/Kota	8	dokumen	213,062,915		-	-	-	2	72,047,760	2	72,047,760	25%	34%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023			
			Target	Satuan	Anggaran		Target Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
2.08.07.203	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	100	Persen	405,603,331		100	100	100%	100	90,784,698	100	90,784,698	100 %	22%
2.08.07.203.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	10	dokumen	405,603,331		-	-	-	2	90,784,698	2	90,784,698	20%	22%
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Rata-rata usia kawin pertama wanita	24,01	tahun	451,826,353		22,05	22,05	100%	22,25	104,829,060	22,25	104,829,060	93%	23%
2.14.02.201	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	23	Tahun	355,187,846		22,05	22,05	100%	22,25	79,500,386	22,25	79,500,386	97	22%
2.14.02.201.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	4	dokumen	111,693,462		-	-	-	1	24,999,936	1	24,999,936	25%	22%
2.14.02.201.09	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS.	Jumlah Satuan Pendidikan yang mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan	20	satuan pendidikan	243,494,384		-	-	-	3	54,500,450	3	54,500,450	15%	22%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023			
			Target	Satuan	Anggaran		Targ et Renj a PD Tahu n 2022	Realis asi Renja PD Tahu n 2022	Tingkat Realisas i			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
	Jalur Nonformal dan Informal	Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal													
2.14.02.202	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	100	Persen	96,638,495		100	100	100%	100	25,328,670	100	25,328,670	100%	26%
2.14.02.202.03	Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah dokumen Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	4	dokumen	19,327,699		-	-	-	1	5,065,734	1	5,065,734	25%	26%
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	4	Laporan	19,327,699						5,065,734		5,065,734		26%
2.14.02.202.11	Penyediaan Data Informasi Keluarga	Jumlah data dan informasi keluarga yang tersedianya	27	dokumen	19,327,699		-	-	-	6	5,065,734	6	5,065,734	22%	26%
2.14.02.202.13	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	4	Dokumen	19,327,699		6	6	100%	1	5,065,734	1	5,065,734	17%	26%
2.14.02.202.13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6	Dokumen	19,327,699		6	6	100%	1	5,065,734	1	5,065,734	17%	26%
02.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)	8,01	Persen	13,531,772,754		9,01	9,14	101,44	8,98	3,139,531,395	8,98	3,139,531,395	112%	23%
		Persentase peserta KB aktif	74,67	persen			74,3	74,32	100,03	74,35		74,35		100%	
2.14.03.201	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk	Persentase cakupan pelaksanaan advokasi KIE	3	Kecamatan	3,338,452,363		3	3	100%	3	821,485,455	3	821,485,455		25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023				
			Target	Satuan	Anggara n		Targ et Renj a PD Tah un 2022	Realis asi Renja PD Tahu n 2022	Tingkat Realisas i		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
	dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal														
2.14.03.201.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada stakeholders dan mitra kerja	4	Organisa si	312,522,734		-	-	-	1	90,271,086	1	90,271,086	25%	29%
2.14.03.201.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	4	Dokume n	405,252,936		-	-	-	1	111,324,200	1	111,324,200	25%	27%
2.14.03.201.04	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	18	Dokume n	611,309,327		-	-	-	4	157,445,042	4	157,445,042	22%	26%
2.14.03.201.06	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	28	laporan	567,738,356		-	-	-	6	129,273,577	6	129,273,577	21%	23%
2.14.03.201.07	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah laporan hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga	18	Laporan	919,213,869		-	-	-	4	210,992,773	4	210,992,773	22%	23%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023				
			Target	Satuan	Anggaran		Targ et Renj a PD Tahun 2022	Realis asi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisas i		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)		11 = (10/4)		
		Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana)													
2.14.03.201.08	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah laporan hasil Pengendalian Program KKBPK	16	laporan	522,415,141		-	-	-	3	122,178,777	3	122,178,777	19%	23%
2.14.03.202	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Prosentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	100	Persen	2,006,215,295		100	100	100%	100	454,292,292	100	454,292,292	100%	23%
2.14.03.202.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	1438	orang	2,006,215,295		-	-	-	359	454,292,292	359	454,292,292	25%	23%
2.14.03.203	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	Prosentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50,76	Persen	6,337,813,800		-	-	-	50,35	1,460,557,437	50,35	1,460,557,437		23%
2.14.03.203.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	101	Laporan	411,265,973		-	-	-	25	97,300,669	25	97,300,669	25%	24%
2.14.03.203.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah akseptor yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	8	orang	430,039,048		-	-	-	1	101,502,577	1	101,502,577	13%	24%
2.14.03.203.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode	Jumlah Orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode	60	orang	1,384,406.977		-	-	-	12	315,114,997	12	315,114,997	20%	23%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023				
			Target	Satuan	Anggaran		Targ et Renja PD Tahun 2022	Realisasi Renja PD Tahun 2022	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)		
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)													
2.14.03.203.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah unit sarana penunjang pelayanan KB	20	unit	2,000,676,561		-	-	-	13	453,052,577	13	453,052,577	65%	23%
2.14.03.203.07	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	620	orang	582,213,996		-	-	-	150	135,563,335	150	135,563,335	24%	23%
2.14.03.203.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	16	Laporan	410,658,618		-	-	-	3	97,164,727	3	97,164,727		24%
2.14.03.203.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah orang yang mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	52	orang	417,128,818		-	-	-	12	98,612,928	12	98,612,928	23%	24%
2.14.03.203.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah akseptor yang mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	610	orang	701,423,809		-	-	-	150	162,245,627	150	162,245,627	25%	23%
2.14.03.204	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	100	Persen	1,849,291,296		100	100	100%	100	403,196,211	100	403,196,211	100%	22%
2.14.03.204.03	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana	6	Kampung	889,098,731		-	-	-	6	199,003,646	6	199,003,646	100%	22%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023			
			Target	Satuan	Anggaran		Targ et Renj a PD Tah un 2022	Realis asi Renja PD Tahu n 2022	Tingkat Realisas i		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
		(Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB												
2.14.03.204.02	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah dokumen integrasi pembangunan lintas sektor di Kampung KB	1	Dokume n	960,192,565					204,192,565		204,192,565		21%
2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Prosentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	74,67	Persen	770,675,176		74,32	82.37	110.83 %	74,35	178,805,760	74,35	178,805,760	23%
2.14.04.201	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	100	Kelompo k	770,675,176		100	100	100%	100	178,805,760	100	178,805,760	23%
2.14.04.201.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah laporan hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	28	laporan	156,052,078		-	-	-	6	36,125,802	6	36,125,802	21% 23%
2.14.04.201.06	Penyediaan Biaya Operasional Bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan UPPKS)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	2	kelompo k	227,318,176		-	-	-	1	52,579,088	1	52,579,088	50% 23%
2.14.04.201.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan	Jumlah laporan hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS,	6	Laporan	200,330,054		-	-	-	1	46,600,870	1	46,600,870	17% 23%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2021-2026			Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 2023		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023			
			Target	Satuan	Anggaran		Targ et Renj a PD Tah un 2022	Realis asi Renja PD Tahu n 2022	Tingkat Realisas i			Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Tahun 2023		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4			5	6	7	8 = (7/6)	9		10 = (5+7+9)		11 = (10/4)	
	Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)													
2.14.04.201.02	Pengadaan Sarana kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS	Jumlah pengadaan sarana kelompok kegiatan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	73	Laporan	186,974,868					13	43,500,000	20	43,500,000	27%	23%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas P3AP2KB

Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dilakukan melalui : Penetapan Indikator Kinerja yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Indikator – indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing – masing jenis indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya dilakukan Analisis Capaian Kinerja atas sasaran yang didasarkan atas hasil pengukuran kinerja kegiatan dalam suatu sasaran dilakukan analisis pencapaian kinerja atas sasaran tersebut. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja.

Secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2023 dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di masa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2. sebagai berikut :

Tabel 2.2.
Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
a.	Indikator Kinerja Utama (IKU)											
1	Persentase kelembagaan PUG aktif	-	-	47,26	47,28	47,3	47,32	55,03	47,28	47,3	47,32	
2	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	-	-	2,14	2,13	2,12	2,11	1,92	2,13	2,12	2,11	
b.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)											
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	-	□	26	27	28	29	4,12		28	29	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	-	□	100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	-	□	0,014	0,012	0,008	0,006	13,81	0,012	0,008	0,006	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023*	Tahun 2024	Tahun 2025	
4	Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	-	☐	2,04	2,03	2,02	2,01	1,92	2,03	2,02	2,01	
5	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun	-	☐	20,5	20,75	21	21,25	1,31	20,75	21	21,25	
6	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK (advokasi dan KIE)	-	☐	27,5	30	32,5	34,5	100	30	32,5	34,5	
7	Persentase pemakaian kontrasepsi modern	-	☐	74,32	74,35	74,4	74,46	72,75	74,35	74,4	74,46	
8	Persentase fasilitasi kesehatan yang siap melayani KB MKJP	-	☐	100	100	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase peserta KB aktif MKJP	-	☐	43,8	43,95	44,1	44,25	72,75	43,95	44,1	44,25	
10	Persentase pelayanan KB pasca persalinan	-	☐	45,5	45,6	45,75	45,8	80,65	45,6	45,75	45,8	
11	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah	-	☐	67,8	67,95	68,01	68,03	14,28	67,95	68,01	68,03	
12	Persentase kesertaan KB keluarga penerima bantuan iuran (PBI)	-	☐	24,5	24,75	24,85	24,95	85,94	24,75	24,85	24,95	

Berdasarkan tabel 2.2 dapat diketahui bahwa :

1. Indikator kinerja Persentase kelembagaan PUG yang aktif merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Restra Tahun 2021-2026. Nilai dari Persentase kelembagaan PUG yang aktif tahun 2023 belum dapat disajikan karena dihitung setahun sekali yaitu pada akhir tahun.
2. Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Restra Tahun 2021-2026 mencapai nilai 100%, karena setiap kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak selalu di selesaikan 100%.
3. Total Fertility Rate (Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi) yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) urusan pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang penghitungannya dilakukan setahun sekali pada akhir tahun 2023.
4. Untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK), dilakukan penghitungan pada akhir tahun.

Untuk itu Dinas P3AP2KB Kota Blitar akan berupaya untuk :

1. Mengoptimalkan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam upaya pencapaian target
2. Meningkatkan fungsi pengendalian program dan kegiatan pembangunan dalam mengoptimalkan pencapaian target
3. Melakukan upaya peningkatan kompetensi SDM aparatur agar lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan dan pengendalian atas pelaksanaan rencana

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas P3AP2KB

Identifikasi permasalahan menjadi hal penting dalam proses penentuan isu-isu penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana Pembangunan daerah. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas Pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas P3AP2KB adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan bagi Dinas P3AP2KB di masa datang.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang sangat signifikan bagi daerah dengan karakteristik yang bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka Panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai kondisi objektif pada Dinas P3AP2KB Kota Blitar dan

berdasarkan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka pada penyusunan Renja Tahun 2024 perlu memperhatikan isu-isu penting tugas dan fungsi yang berkembang di Dinas P3AP2KB Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pendekatan dan keterlibatan para pihak dalam mengatasi kesenjangan gender
2. Pemberdayaan Perempuan di sektor politik, ekonomi dan hukum belum sepenuhnya optimal
3. Belum optimalnya kesadaran akan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
4. Kurang optimalnya peran jejaring dalam penanganan permasalahan Perempuan dan anak
5. Masih adanya pasangan usia subur yang belum mengikuti KB dan adanya peserta KB aktif yang drop out kontrasepsi
6. Masih adanya pasangan usia subur yang istrinya berusia kurang dari 20 tahun.
7. Kurang optimalnya kinerja perangkat daerah (SAKIP)

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024
Kota Blitar

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kota Blitar	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100	1.001.999.200	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Kota Blitar	Persentase perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	100%	1.001.998.700	
	Kota Blitar	Persentase komposisi perempuan di sektor bisnis	0,33			Kota Blitar	Persentase komposisi perempuan di sektor bisnis	0,33%		
	Kota Blitar	Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	47			Kota Blitar	Persentase perempuan pengambilan keputusan publik	47%		
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	20,54	92.499.700	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Kota Blitar	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	20,54	92.499.400	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	3	92.499.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	4	92.499.400	
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	20,54	309.499.900	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	20,54	309.499.900,00	
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi KewenanganKabupaten/Kota	7	188.499.900	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	7	188.499.900	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Blitar	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	121.000.000	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Kota Blitar	Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	1	121.00.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kota Blitar	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	3	599.999.600	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan	Kota Blitar	Jumlah Organisasi Perempuan yang terfasilitasi	3	599.999.400	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Kewenangan Kabupaten/Kota					Kewenangan Kabupaten/Kota					
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	21	114.999.600	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan	21	114.999.600	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	614	484.999.800	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	614	484.999.800	
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Blitar	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100	179.849.500	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Kota Blitar	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan	100	179.849.500	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100	29.664.482	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan	100	27.349.800	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	27.349.800	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	27.349.800	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100	70.999.900	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100	70.999.900	
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1	44.999.900	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan	1	44.999.900	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	26.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	26.000.000	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Kota Blitar	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif	100	81.499.800	Penguatan dan Pengembangan Lembaga	Kota Blitar	Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif	100	81.499.800,00	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		memberikan layanan perlindungan			Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		memberikan layanan perlindungan			
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	115	25.999.900	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	115	25.999.900	
Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	55.499.900	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	2	55.499.900	
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Blitar	Persentase peningkatan pelebagaan pemenuhan hak anak	100	209.999.700	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kota Blitar	Persentase peningkatan pelebagaan pemenuhan hak anak	100	171.781.900	
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	100	37.000.000	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase anak yang partisipasi dalam perencanaan pembangunan	100	37.000.000,00	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	37.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelebagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	37.000.000,00	
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	100	172.999.700	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak	100	134.781.900	
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100	21.000.000	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	50	27.000.000	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2	151.999.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3	107.781.900	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Blitar	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100	201.997.500	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Kota Blitar	Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih	100	233.894.500	
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	100	109.999.700	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak	100	126.659.500	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	5	109.999.700	Penguatan kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPA	Kota Blitar	Jumlah kegiatan pencegahan KtPA terpadu	5	126.659.500	Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	100	27.499.700	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus	100	27.499.700	
					Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan	0	0	Untuk Persiapan UPTD PPA
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2	27.499.700	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	Kota Blitar	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	1	27.499.700	Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	100	64.498.100	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Lembaga Penyedia Layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak	100	79.735.300	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	2	64.498.100	Peningkatan Kapasitas SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan pencegahan AMPK	Kota Blitar	Jumlah SDM Penyedia Layanan Anak yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK	2	79.735.300	Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan

RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Blitar	Rata-rata usia kawin pertama wanita	23,35	238.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Kota Blitar	Rata-rata usia kawin pertama wanita	23,35	238.000.000,00	
Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Blitar	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22,5	73.500.000	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Kota Blitar	Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)	22,5	73.500.000,00	
Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	26.000.000	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	1	26.000.000	
Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Kota Blitar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	5	47.500.000	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Kota Blitar	Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	5	47.500.000	
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	100	164.500.000	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Blitar	Persentase Profil Kependudukan yang Tersedia	100	164.500.000,00	
Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	19.500.000	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	1	19.500.000	
Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	6	19.000.000	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Kota Blitar	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	6	19.000.000	
Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	6	18.000.000	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1	18.000.000	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Blitar	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	1	64.200.000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Kota Blitar	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	6	64.200.000	
Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Blitar	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1	43.800.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Kota Blitar	Jumlah laporan pencatatan dan pengumpulan data keluarga	1	43.800.000	
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kota Blitar	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,55	1.968.778.454	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Kota Blitar	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	8,55	1.968.728.454,00	
	Kota Blitar	Persentase KB Aktif	74,4			Kota Blitar	Persentase KB Aktif	74,4		

RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Blitar	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	3	533.235.611	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Kota Blitar	Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB	3	533.235.611	
Advokasi Program KKBPK kepada <i>Stakeholders</i> dan <i>Mitra Kerja</i>	Kota Blitar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan <i>Mitra Kerja</i> Lokal	1	119.985.000	Advokasi Program Bangga Kencana oleh pokja advokasi kepada stakeholder dan <i>Mitra Kerja</i>	Kota Blitar	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada <i>Stakeholders</i> dan <i>Mitra Kerja</i> Lokal	1	119.985.000	Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan
Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4	149.844.200	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	4	149.844.200	
Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Blitar	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	6	39.000.000	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Kota Blitar	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	6	39.000.000	Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan
Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4	144.418.296	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	4	144.418.296	Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan
Pengendalian Program KKBPK	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3	79.988.115	Pengendalian Program KKBPK	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	3	79.988.115	
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Blitar	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	100	314.784.378	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Kota Blitar	Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi	100	314.784.378	
Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Blitar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	359	314.784.378	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Kota Blitar	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	359	314.784.378	
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan	Kota Blitar	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50,45	793.065.900	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan	Kota Blitar	Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	50,45	793.015.900	

RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
KB di Daerah Kabupaten/Kota					KB di Daerah Kabupaten/Kota					
Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	25	11.078.600	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Blitar	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	24	11.078.600	
Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	14	271.468.100	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	271.468.100	
Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15	357.898.000	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Kota Blitar	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	15	357.898.000	
Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	155	33.500.000	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	150	33.500.000	
Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3	27.621.200	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	3	27.621.200	
Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	12	14.000.000	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang mengikuti promosi dan konseling KB Pasca Persalinan	170	13.950.000	Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan
Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Blitar	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	150	77.500.000	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Kota Blitar	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	270	77.500.000	
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Blitar	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	100	327.692.565	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Kota Blitar	Persentase Kampung KB yang terfasilitasi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan KB	100	327.692.565	
Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Blitar	Jumlah dokumen integrasi pembangunan lintas sector di kampung KB	1	204.192.565	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Kota Blitar	Jumlah dokumen hasil integrasi pembangunan lintas sector di kampung KB	1	204.192.565	
Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Kota Blitar	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangsa kencana (Pembangunan	6	123.500.000	Pelaksanaan dan pengelolaan program Bangsa Kencana di kampung KB	Kota Blitar	Jumlah kampung KB yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangsa kencana (Pembangunan	6	123.500.000	Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
		Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB					Keluarga, kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB			
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Blitar	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	74,4	1.052.190.335	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Kota Blitar	Persentase anggota kelompok Tribina & UPPKS yang ber KB	74,4	187.746.048	
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Blitar	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	100	1.052.190.335	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Kota Blitar	Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina	100	1.052.190.335	
Pengadaan sarana kelompokkegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Blitar	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	13	360.000.000	Pengadaan sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Blitar	Jumlah unit sarana kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia	13	360.000.000	Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan
Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6	78.000.000	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Kota Blitar	Jumlah kader yang mengikuti Hasil Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	6	78.000.000	Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan
Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Blitar	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	545.690.335	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA)	Kota Blitar	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor/UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	1	545.690.335	Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan
Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Kota Blitar	Jumlah Laporan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	68.500.000	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Kota Blitar	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	1	68.500.000	Penyesuaian nomenklatur sub kegiatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik / 84	4.281.783.044	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Blitar	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Baik / 84	4.305.054.044	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100	35.507.500	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	100	35.507.500	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	15.268.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7	15.268.500	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	20.239.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13	20.239.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	3.368.860.339	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100	3.358.008.389	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	3.365.210.339	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	3.354.358.389	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	3.650.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2	3.650.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	112.547.500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100	118.075.200	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33	62.461.500	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kota Blitar	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	33	62.461.500	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	99	50.086.000	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kota Blitar	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	99	50.086.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	259.918.700	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Blitar	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100	282.221.450.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8.596.500	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	8.581.900	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	16.899.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	18.458.168	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	13.732.300	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kota Blitar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4	13.732.300	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	9.220.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Blitar	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6	9.220.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	17.999.900	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kota Blitar	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	17.999.900	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	5.400.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24	5.400.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	200.102.950	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	4.970.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Blitar	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1	4.680.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	24.820.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Blitar	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	100	31.113.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	24.820.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	31.113.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	100	269.749.500	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart	100	269.749.500	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.196.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	1.196.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	64.991.505	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	64.991.505	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	203.562.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Blitar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2	203.562.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100	210.379.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Blitar	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart	100	210.379.500	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	108.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Blitar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	41	108.500.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42	29.873.500	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	42	29.873.500	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	70.006.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Blitar	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	70.006.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	3	2.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Kota Blitar	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	3	2.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISA KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
JUMLAH				9.151.497.433	JUMLAH				9.151.497.433	

BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan perencanaan Dinas P3AP2KB di Kota Blitar mengacu pada kebijakan Nasional maupun Provinsi, agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan di tingkat Nasional maupun Provinsi. Berikut adalah hasil identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi yang berkaitan dengan pembangunan pemberdayaan perempuan dan pengendalian penduduk :

No.	Kebijakan Nasional / Provinsi	Sumber
	A. Nasional	
1	a) Meningkatnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan b) Meningkatnya kualitas tumbuh kembang anak dan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak serta perlindungan khusus anak c) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan kualitas keluarga dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak d) Menurunnya segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di ruang publik, domestik, tempat kerja, situasi darurat kondisi khusus, dan perempuan korban TPPO, serta meningkatnya layanan bagi perempuan korban kekerasan dan TPPO e) Meningkatnya layanan bagi anak korban kekerasan dan yang memerlukan perlindungan khusus	Renstra Kemen PPPA 2020-2024
2	a) Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup, serta menguatkan pembentukan karakter di keluarga b) Menguatnya pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk c) Meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan KBKR yang komprehensif berbasis kewilayahan dan fokus pada segmentasi sasaran d) Meningkatkan Advokasi dan Penggerakan Program Bangga Kencana sesuai dengan karakteristik wilayah dan segmentasi sasaran e) Memperkuat sistem informasi keluarga yang terintegrasi	Renstra BKKBN 2020-2024

	B. PROVINSI	
1	a) Meningkatkan penguatan kelembagaan, koordinasi, dan jaringan PUG mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi di berbagai bidang pembangunan termasuk penyediaan data gender b) Meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang politik, pemerintahan, dan ekonomi c) Meningkatkan sosialisasi berbagai produk hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan trafficking d) Meningkatkan sosialisasi berbagai produk hukum tentang penghapusan segala bentuk kekerasan, serta meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan terhadap anak e) Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga f) Fasilitasi dan pembinaan administrasi kependudukan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak penduduk terkait kepemilikan dokumen kependudukan	Renstra DP3AK Provinsi Jawa Timur 2019-2024

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 yang telah ditetapkan, maka selanjutnya dirumusan pernyataan tujuan dan sasaran yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana telah sesuai dengan Rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerja disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Dinas P3AP2KB Kota Blitar

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target 2024	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi		TARGET			
						2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Menurunnya kesenjangan gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	67,94	Kelembagaan PUG yang aktif	Persentase kelembagaan PUG aktif	-	55,03	47,28	47,30	47,32	47,35
				Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan	Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya pengendalian penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	0,67	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR)	Total Fertility Rate (Rata- rata jumlah anak yang dilahirkan oleh ibu selama masa reproduksi)	2,13	1,92	2,13	2,12	2,12	2,11
3	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (84)	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A 84,32	A 85,32	A (83)	A (84)	A (84)	A (84,5)

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana berikut :

TABEL 4.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN
DAN SUB KEGIATAN DINAS P3AP2KB TAHUN
2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KOTA BLITAR

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				9.151.497.433,00			10.327.618.774,00
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.151.497.433,00			10.327.618.774,00
	2,08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				5.875.628.944,00			6.626.999.866,00
1	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		Baik/84	4.305.054.044		Baik / 84	4.470.899.758,00
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart		100 %	35.507.500,00		100 %	51.742.307,00
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	15.268.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Dokumen	11.278.575,00
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Laporan	20.239.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	13 Laporan	40.463.732,00
	2.08.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah yang sesuai standar		100 Persen	3.358.008.389,00		24 Orang/bulan	3.574.517.840,00
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Orang/bulan	3.354.358.389,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	24 Orang/bulan	3.570.548.840,00
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	3.650.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	3.969.000,00
	2.08.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar		100 Persen	118.075.200,00		99 Paket	97.840.549,00
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Blitar, Semua	99 Paket	50.086.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	99 Paket	54.137.160,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Kecamatan, Semua Kel/Desa					
	2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	33 Orang	67.989.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	33 Orang	43.703.389,00
	2.08.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerahsesuai standar</i>		100 Persen	282.221.450,00		1 Paket	207.703.389
	2.08.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	8.581.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	9.481.500,00
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	<i>Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 paket	16.899.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 paket	19.381.076
	2.08.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	13.732.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Paket	16.934.400,00
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	14.825.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	4 Paket	10.606.94200
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	17.999.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Paket	19.492.200,00
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Dokumen	5.400.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	24 Dokumen	6.804.000,00
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	60 Laporan	200.102.950,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	60 Laporan	121.257.963,00
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	4.680.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	3.733.002,00
	2.08.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan</i>		100 Persen	31.113.000,00		100%	13.419.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.08.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	31.113.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Unit	13.419.000,00
	2.08.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar</i>		100 Persen	269.749.505,00		100%	299.551.728,00
	2.08.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.196.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	1.385.630,00
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	64.991.505,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	36 Laporan	66.557.598,00
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	203.562.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Laporan	231.608.500,00
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart</i>		100 Persen	210.379.500,00		100 %	226.137.251,00
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	41 Unit	108.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	41 Unit	122.948.548,00
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	42 Unit	29.873.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	42 Unit	31.777.203,00
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	70.005.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Unit	69.311.500,00
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Unit	2.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Unit	2.100.000,00
2	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	<i>Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan PPRG</i> <i>Persentase Perempuan pengambilan keputusan public</i> <i>Persentase komposisi Perempuan di sektor bisnis</i>		100 % 47 % 0,33 %	1.001.999.200,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100 % 45 % 0,3 %	1.032.758.160,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik, hukum, social dan ekonomi</i>		20,54 %	92.499.400,00		20,80 %	101.224.706,00
	2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	92.499.400,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	101.224.706,00
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase perempuan yang mendapatkan fasilitasi dalam bidang politik hukum sosial dan ekonomi</i>		20,54%	309.499.900,00		20,67%	336.971.116,00
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	<i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Dokumen	188.499.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	7 Dokumen	212.057.341,00
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	<i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Organisasi	121.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	1 Organisasi	124.913.775,00
	2.08.02.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah organisasi perempuan yang terfasilitasi</i>		2 organisasi	599.999.400,00		1 organisasi	594.562.338,00
	2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	21 Lembaga	114.999.600,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	21 Lembaga	80.381.250,00
	2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	614 Orang	484.999.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA BAGI HASIL	614 Orang	514.181.088,00
3	2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	<i>Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan</i>		100 %	179.849.500,00		100 %	435.216.361,00
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Perempuan aktif dalam sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan</i>		100 %	27.349.800,00		100 %	102.055.771,00
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	27.349.800,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	102.055.771,00
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase perempuan korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih</i>		100 %	70.999.900,00		100 %	211.856.925,00
	2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan</i>	- Kota Blitar, Semua	1 Orang	44.999.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Orang	47.683.125,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
				Kecamatan, Semua Kel/Desa					
	2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Layanan	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Layanan	164.173.800,00
	2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase lembaga perlindungan perempuan yang aktif memberikan layanan perlindungan</i>		100 %	81.499.800,00		100 %	121.303.665,00
	2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35Orang	25.999.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	35 Orang	54.076.288,00
	2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	55.499.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	67.227.377,00
4	2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	<i>Persentase peningkatan pelembagaan pemenuhan hak anak</i>		100%	171.781.900,00		100 %	89.877.725,00
	2.08.06.2.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase anak yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan</i>		100 %	37.000.000,00		100%	33.641.758,00
	2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	37.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	33.641.758,00
	2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Persentase lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha yang terkait mencapai target indikator Kota Layak Anak</i>		100 %	134.781.900,00		100 %	56.235.967,00
	2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	50 Orang	27.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	100 Orang	20.698.391,00
	2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	107.781.900,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	3 Dokumen	35.537.576,00
5	2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	<i>Persentase anak korban kekerasan mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih</i>		100 %	233.894.500,00		100 %	598.247.862,00
	2.08.07.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase lembaga yang mendapat sosialisasi pencegahan kekerasan anak</i>		100%	126.659.500,00		100%	180.955.012,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.08.07.2.01.0003	Penguatan Kerjasama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak, kecamatan layak anak, desa/kelurahan layak anak dan DRPA	<i>Jumlah kegiatan pencegahan KtPA</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 kegiatan	126.659.500,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Dokumen	180.955.012,00
	2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase anak korban yang mendapat layanan perlindungan khusus</i>		100 %	27.499.700,00		100%	312.436.525,00
	2.08.07.2.02.0005	Penyediaan layanan pengaduan Masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 orang	100.000.000,00
	2.08.07.2.02.0006	Koordinasi pelaksanaan layanan AMPK	<i>Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Orang	27.499.700,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 orang	212.436.525,00
	2.08.07.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase lembaga penyedia layanan dalam peningkatan kualitas hidup anak</i>		100 %	79.735.300,00		2 Dokumen	104.856.325,00
	2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM Lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah SDM penyedia layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat perlindungan dan penanganan AMPK</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 orang	79.735.300,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	2 Dokumen	104.856.325,00
	2,14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				3.258.918.789,00			3.700.618.908,00
1	2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	<i>Rata-rata usia kawin pertama wanita</i>		23,35 Tahun	238.000.000,00		23,75	274.546.683,00
	2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	<i>Capaian Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP)</i>		22,5 Tahun	73.500.000,00		22,75	91.822.944,00
	2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	26.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	28.874.925,00
	2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	<i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Satuan Pendidikan	47.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	5 Satuan Pendidikan	62.948.019,00
	2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase profil kependudukan yang tersedia</i>		100 Persen	164.500.000,00		100 %	182.723.739,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	64.200.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	1 Laporan	43.778.122,00
	2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	<i>Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Dokumen	19.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Dokumen	43.778.122,00
	2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	<i>Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	43.800.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	1 Laporan	45.000.000,00
	2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	<i>Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	18.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	1 Dokumen	20.000.000,00
	2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	<i>Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	19.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Dokumen	30.167.495,00
2	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	<i>Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmeet Need)</i>		8,55 Indeks	1.968.778.454,00		8,25	2.191.181.510,00
			<i>Persentase KB aktif</i>		74,4 Persen			74,46	
	2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	<i>Cakupan pelaksanaan Advokasi, KOMunikasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB</i>		3 Kecamatan	533.235.611,00		3 kecamatan	556.458.460,00
	2.14.03.2.01.0008	Pengendalian Program KKBPK	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	79.988.115,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	3 Laporan	80.000.000,00
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana	<i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Laporan	144.418.296,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4 Laporan	145.000.000,00
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	<i>Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	39.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	6 Laporan	54.458.460,00
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	<i>Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,</i>	- Kota Blitar, Semua	4 Dokumen	149.844.200,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	4 Dokumen	152.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
			<i>dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang</i>	Kecamatan, Semua Kel/Desa					
	2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga Kencana kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	<i>Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Organisasi	119.985.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	1 Organisasi	125.000.000,00
	2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	<i>Persentase Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) yang terfasilitasi</i>		100 Persen	314.784.378,00		359 Orang	425.316.870,00
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	<i>Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	359 Orang	314.784.378,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB, DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	359 Orang	425.316.870,00
	2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Capaian Peserta KB Baru Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>		50,45 %	793.015.900,00		50,45%	879.406.180,00
	2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	11.078.600,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	24 Laporan	12.991.546,00
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	100 Orang	271.468.100,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	100 Orang	272.000.000,00
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	<i>Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 Unit	357.898.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-KB	15 Unit	429.885.000,00
	2.14.03.2.03.0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	150 Orang	33.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	150 Orang	57.184.924,00
	2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	<i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Laporan	27.621.200,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	3 Laporan	12.834.533,00
	2.14.03.2.03.0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	<i>Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	270 Orang	77.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	270 Orang	80.002.972,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025	
				LOKASI	TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
	2.14.03.2.03.0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti promosi dan konseling KB Pasca PErsalinan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	170 Orang	13.950.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	170 Orang	14.507.205,00
	2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	<i>Persentase Kampung KB yang terfasilitasi pelayanan dan pembinaan kesertaan KB</i>		100 %	327.692.565,00		100 %	330.000.000,00
	2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	<i>Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	204.192.565,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	1 Dokumen	205.000.000,00
	2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	<i>Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang Mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Kampung	123.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAK NON FISIK-BOK KB-BOKB	6 Kampung	125.000.000,00
3	2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	<i>Persentase anggota Kelompok Tribina & UPPKS yang ber-KB</i>		74.4Persen	1.052.190.335,00		74,46 %	1.234.890.715,00
	2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	<i>Persentase Kelompok Tribina dan UPPKS serta Saka yang terbina</i>		100 Persen	1.052.190.335,00		13 Unit	1.234.890.715,00
	2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	<i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	68.500.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	1 Laporan	73.427.458,00
	2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	<i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA)) yang tersedia</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	13 Unit	360.000.000,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	13 Unit	365.000.000,00
	2.14.04.2.01.0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA))	<i>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor(UPPKA))</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Laporan	78.000.000,00	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	6 Laporan	122.516.196,00
	2.14.04.2.01.0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	<i>Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang mendapat biaya operasional kegiatan</i>	- Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kelompok	545.690.335,00	DAK NON FISIK-BOKKB-BOKB	1 Kelompok	673.947.061,00
	J U M L A H					9.151.497.433,00			10.227.618.774,00

4.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Selain berpedoman pada prioritas daerah, penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Rencana Kerja Dinas P3AP2KB juga didasarkan pada rencana tindak lanjut atas langkah perbaikan sebagaimana tertuang dalam LKJIP Dinas P3AP2KB Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 4.2
Rencana Tindak Lanjut LKJIP Dinas P3AP2KB Tahun 2022 pada
Renja Dinas P3AP2KB Tahun 2024

No	Langkah Perbaikan LKJIP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan
1.	Kelembagaan PUG yang aktif :		
	a. Mengadakan pelatihan serta pemberian edukasi terkait PUG secara rutin dan konsisten	Akan dilakukan pelatihan secara rutin setiap tahun dan pendampingan penyusunan PPRG kepada OPD	<i>Program</i> Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; <i>Kegiatan</i> Pelebagaan
	b. Membuat system data terpilah	Membuat system data terpilah gender di seluruh OPD	Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah kewenangan Kab/Kota; <i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kab/Kota
2.	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan :		
	a. Penanganan pendampingan kasus kekerasan tetap sesuai SOP	Dalam memberikan pelayanan dan pendampingan penanganan kasus	Program Perlindungan Perempuan;

		kekerasan terhadap perempuan berdasarkan SOP yang telah ada	<i>Kegiatan</i> Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan; <i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan dan; <i>Sub kegiatan</i> koordinasi dan sinronisasi pelaksanaan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan
3.	Meningkatnya penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak :		
	a. Penanganan pendampingan kasus kekerasan tetap sesuai SOP	Untuk menyelesaikan kasus kekerasan terhadap anak, dilakukan dengan pelayanan dan pendampingan yang berdasarkan SOP	<i>Program</i> Perlindungan Khusus Anak; <i>Kegiatan</i> Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; <i>Sub Kegiatan</i> Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus; dan <i>Sub Kegiatan</i> Koordinasi

			pelaksanaan layanan AMPK
4.	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) per perempuan usia reproduksi :		
	a. Diperlukan inovasi strategi Promosi dan KIE Pasangan Usia Subur/generasi milenial melalui optimalisasi pemanfaatan KIE dengan media sosial	Membuat inovasi dalam rangka promosi dan KIE kepada PUS dan generasi milenial melalui media sosial	<i>Program</i> Pembinaan Keluarga Berencana; <i>Kegiatan</i> Pelaksanaan Advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan local; <i>Sub Kegiatan</i> Promosi dan KIE program Bangga Kencana melalui media massa, cetak dan elektronik serta media luar ruang

Semoga Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

5.1. KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dinas P3AP2KB Kota Blitar berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kota Blitar tahun 2024;
2. Dinas P3AP2KB Kota Blitar berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renja Dinas P3AP2KB tahun 2024 ;
3. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas P3AP2KB Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - o melaksanakan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - o menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.
5. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2024 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

5.2. RENCANA TINDAK LANJUT

Dengan ditetapkannya RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan

digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Rencana Kerja Dinas P3AP2KB Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.